BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah suatu negara, terutama Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya sangat memerlukan dana yang jumlahnya semakin tahun semakin meningkat. Direktorat Jenderal Pajak mengemban tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan berdasarkan Undang-undang, untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Penerimaan dalam negeri ini digunakan untuk membiayai anggaran penyelenggaraan negara, pelayanan dan pembangunan nasional.

Biaya penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar agar tercipta kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Keuangan, pada tahun 2008 rencana penerimaan pajak termasuk PPh migas yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 534,53 triliun atau sebesar 59,72 % dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN 2008. Rencana penerimaan ini meningkat 25,41 % dibandingkan penerimaan pajak tahun 2007 sebesar Rp. 426,22 triliun. Tugas berat yang dipikul oleh Direktorat Jenderal Pajak ini hanya akan dapat dicapai jika didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat khususnya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk membayar pajak sangat diperlukan. Pajak dapat digunakan untuk kelangsungan pembangunan dan pembiayaan negara berupa alokasi belanja negara dalam APBN, yaitu :

1. Belanja Pemerintah Pusat, yang meliputi :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang;
 - c. Belanja modal;
 - d. Pembayaran bunga utang;
 - e. Subsidi: Subsidi BBM dan Subsidi Non BBM (pangan dan lain-lain)
 - f. Belanja hibah;
 - g. Bantuan sosial;

- h. Belanja lain-lain.
2. Belanja Pemerintah daerah (Transfer)
- a. Dana perimbangan;
 - b. Dana Otonomi Khusus.

Penerimaan dalam negeri berupa pajak telah menjadi sektor yang sangat penting dan dewasa ini menjadi primadona penerimaan negara. Upaya kearah kemandirian pembiayaan tersebut telah dilakukan pemerintah melalui pembaharuan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat memperluas objek dan subjek pajak, tetapi harus tetap dalam kerangka atas keadilan (dapat melalui ekstensifikasi, intensifikasi pemungutan pajak dan meningkatkan prosentase *tax ratio*). Salah satu bentuk pembaharuan dasar adalah perubahan sistem pajak dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment* yang berlaku sejak 1 Januari 1984, sebagaimana adanya perubahan Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 6 KUP Tahun 1983) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 (UU No. 28 KUP Tahun 2007), yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Kewajiban pemerintah, dalam hal ini aparat pajak (*fiskus*), adalah melakukan pembinaan pelayanan dan pengawasan (melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak di hampir semua negara diwajibkan untuk melaporkan jumlah penghasilan maupun kekayaannya dalam laporan pajak yang dibuat sendiri (*self assessment*) maupun oleh orang lain (*official assessment*). Hampir semua negara dengan latar belakang perkembangan ekonomi, sosial, hukum dan budaya apapun masih banyak ditemukan beberapa laporan pajak dalam surat pemberitahuan yang berisi kesalahan-kesalahan yuridis fiskalnya, disengaja atau tidak disengaja

terutama di negara yang menganut sistem pemungut pajak *self assessment* yang mengatur tentang kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan pajak terhadap laporan pajak dalam surat pemberitahuan yang diterima wajib pajak.

Sistem *self assessment*, Wajib Pajak dibebani kewajiban untuk melaporkan semua informasi yang relevan dalam laporan pajaknya (Surat Pemberitahuan), menghitung dasar pengenaan pajak, mengkalkulasi jumlah pajak yang terhutang dan mengangsur jumlah pajak yang terhutang, sehingga tugas *fiskus* dalam hal ini adalah hanya melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan dan pengawasan (salah satunya dengan pemeriksaan pajak). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan baik ketetapan pelaporan maupun tingkat kebenaran pengisian surat pemberitahuan sangat dipengaruhi oleh tingkat peraturan perundang-undangan perpajakan. Kurangnya pemahaman akan ketentuan peraturan perpajakan dapat berakibat kesalahan penyusunan surat pemberitahuan yang selayaknya dianggap ketidakpatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Disisi lain Direktorat Jenderal Pajak akan terus meningkatkan kualitas aparatnya dan memperbaiki ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga pada akhirnya para penyelundup pajak dan Wajib Pajak yang tidak patuh akan terdeteksi oleh aparat pajak yang akan berdampak pada koreksi fiskal yang menambah pendapatan negara.

Disamping itu sistem *self assessment* juga memberikan peluang untuk melakukan penyelundupan pajak baik *Unilateral* maupun *Bilateral*. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan surat pemberitahuan serta tidak ada ketegasan dari instansi akan berkembang sedemikian rupa sehingga mencapai suatu tingkat dimana suatu sistem perpajakan akan lumpuh.

Direktorat Jenderal Pajak yang dibebani tugas pencapaian penerimaan negara tersebut harus bekerja ekstra. Agar target penerimaan tercapai, salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan:

- a. Perbaikan sistem dan administrasi perpajakan;
- b. Peningkatan kepatuhan wajib pajak;
- c. Peningkatan jumlah wajib pajak;

- d. Peningkatan penerimaan pajak untuk tahun 2008 dan tahun-tahun yang akan datang.

Jumlah penerimaan pajak di suatu negara sangat berkaitan erat dengan jumlah prosentase wajib pajak (*tax ratio*), jumlah *tax ratio* di negara Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara lain, oleh karena itu potensi penerimaan negara khususnya dari sektor pajak masih dapat dioptimalkan.

Tabel 1.1
Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Beberapa Negara

Negara	PPh Badan	PPh Orang Pribadi
Selandia Baru	22%	78%
Australia	30%	70%
Amerika Serikat	15%	85%
Swiss	20%	80%
Belgia	19%	81%
Finlandia	23%	77%
Korea Selatan	50%	50%
Indonesia	66%	34%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan

Dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan tentang kebijakan Pelaksanaan Pasal 37 A UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan *Sunset Policy*, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan perbaikan sistem dan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan jumlah Wajib Pajak dan peningkatan target penerimaan pajak.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan *Sunset Policy* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dan Peningkatan Jumlah Wajib Pajak”**.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rujukan dari penelitian terdahulu yang disusun oleh Hendra Wahyu Adi Putra dari Universitas

Widyatama pada tahun 2008 yang berjudul “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan” (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees).

Penelitian kali ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dengan variabel independen pelaksanaan *Sunset Policy* serta variabel dependen peningkatan penerimaan pajak penghasilan dan peningkatan jumlah wajib pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah tentang Pengaruh Pelaksanaan *Sunset Policy* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dan Peningkatan Jumlah Wajib Pajak, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai :

1. Bagaimana pelaksanaan *Sunset Policy* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
3. Bagaimana jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
4. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees .
5. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Sunset Policy* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
3. Untuk mengetahui bagaimana jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang perpajakan.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih spesifik mengenai hal-hal yang berkaitan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sistem perundang-undangan perpajakan yang menganut sistem *self assessment* pada prinsipnya memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan menyetor serta melaporkan pajaknya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pajak yang sangat penting.

Selama ini sebagian dari, baik aparat pajak maupun Wajib Pajak, telah terjebak dalam persepsi yang salah bahwa dalam pemungutan pajak, *fiskus* akan berusaha untuk mengenakan pajak sebesar-besarnya, sedangkan Wajib Pajak akan berusaha untuk membayar sekecil-kecilnya. Hal tersebut dapat ditolerir jika masih dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku. Namun jika usaha meminimalkan kewajiban perpajakan ditempuh dengan cara menerobos peraturan perundang-undangan peraturan perpajakan yang berlaku, maka jelas hal tersebut akan mendapat sanksi dari pemerintah, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dibuat.

Pajak yang dibebankan oleh pemerintah dalam bentuk pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak, merupakan upaya untuk mewujudkan pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun pajak bukanlah merupakan iuran yang sifatnya sukarela, akan tetapi pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan kemungkinan-kemungkinan surat paksa, sita dan pelaksanaan lelang serta sanksi-sanksi terhadap pidana yang dapat diancam dengan pidana kurungan atau penjara.

Membayar pajak memerlukan kesadaran dari masyarakat terutama Wajib Pajak. Pada dasarnya tidak seorang pun yang senang membayar pajak, karena mungkin pembayaran pajak tidak mendapatkan kontra prestasi (imbalan) langsung bagi si pembayaran pajak. Dalam literatur perpajakan dikenal dua cara untuk meminimalkan pembayaran pajak di atas :

1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax avoidance*).
2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatan itu kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama (*tax evasion*).

Salah satu upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah dengan dilaksanakannya fungsi utama instansi pajak, yaitu :

1. Fungsi verifikasi atau pemeriksaan (*the audit function*) yang ditujukan untuk meneliti dan mengambil tindakan yang tepat agar pembayaran pajak oleh para pembayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi pemungutan atau penagihan (*the collection function*) yang ditujukan untuk meneliti dan mencatat pembayaran pajak, meneliti bahwa semua surat pemberitahuan telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas yang diikuti dengan pelunasan pajak yang terutang, baik sebagian maupun seluruhnya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Disamping itu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi perpajakan mulai dari pembaharuan sistem dan administrasi guna penerapan perpajakan yang lebih adil sampai dengan perubahan *performance* aparat pajak yang ramah dan profesional serta mengedepankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak, sesuai dengan mottonya : **"Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya"**.

Sistem dan administrasi perpajakan telah mengalami beberapa kali perubahan baik berupa perubahan Undang-undang maupun perubahan berbagai peraturan pelaksanaan perpajakan. Adapun perubahan Undang-undang mulai dari perubahan Undang-undang KUP No. 6 tahun 1983 terakhir dengan Undang-

undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun Undang-undang No. 7 tahun 1983 dan terakhir Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Di dalam upaya meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak mulai tahun 2008 dan seterusnya, pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan mengeluarkan kebijakan *Sunset Policy*, yaitu berupa kebijakan pelaksanaan Pasal 37 A Undang-undang nomor 28 tahun 2007 KUP, adapun pasal 37 A diantaranya:

1. Wajib pajak yang menyampaikan pembetulan SPT tahunan PPh sebelum tahun 2007, yang mengakibatkan pajak masih harus dibayar menjadi lebih lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Mengingat pokok-pokok pemikiran di atas, maka tingkat penerimaan pajak berkaitan erat dengan kesadaran dan jumlah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka disusunlah hipotesis:

1. "Pelaksanaan *Sunset Policy* Berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan".
2. "Pelaksanaan *Sunset Policy* Berpengaruh Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak".

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini melalui pendekatan survey dan metode asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Permasalahan asosiatif adalah suatu pernyataan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, maka ditempuh beberapa cara yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data secara langsung mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan melakukan :

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan (baca : Kantor Pelayanan Pajak) yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan bagian pemeriksaan wajib pajak yang ada di dalam Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adjie no. 372 Bandung 40223. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2009 sampai dengan selesai.